

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran analisis mengenai hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kemiskinan terdapat pengaruh secara parsial atau mampu menjelaskan pengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada provinsi di Pulau Kalimantan dan memiliki koefisien atau pengaruh negatif maka, hipotesis pertama (H_1) diterima. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Kalimantan Barat dan diikuti dengan APS yang rendah akibat keterbatasan ekonomi, minimnya lapangan kerja dan didukung ketimpangan akses pendidikan. Sebaliknya, penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan berkontribusi pada peningkatan APS. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan melalui subsidi pendidikan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang masif untuk meningkatkan APS.
- b. PDRB per kapita terdapat pengaruh secara parsial atau mampu menjelaskan pengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada provinsi di Pulau Kalimantan dan memiliki koefisien atau pengaruh positif maka, hipotesis kedua (H_2) diterima. Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan diikuti dengan APS tertinggi, didukung sektor ekonomi kuat dan pembangunan pendidikan. Sebaliknya, Kalimantan Barat dengan PDRB per kapita terendah, menunjukkan APS yang rendah karena keterbatasan ekonomi. Peningkatan PDRB per kapita dapat dilakukan melalui investasi pada sektor yang memiliki peluang meningkatkan pendapatan penduduk secara keseluruhan.
- c. Jumlah sekolah tidak memiliki pengaruh secara parsial atau tidak mampu menjelaskan pengaruh terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada provinsi di Pulau Kalimantan namun, memiliki koefisien atau pengaruh positif maka, hipotesis ketiga (H_3) belum sepenuhnya diterima. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang tersedia belum merata, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil. Provinsi Kalimantan Barat, memiliki jumlah sekolah terbanyak, namun APS rendah akibat tantangan geografis

dan kondisi ekonomi masyarakat. Sebaliknya, Kalimantan Utara dengan jumlah sekolah terendah namun pemerintah provinsi konsisten melakukan pembangunan unit sekolah setiap tahunnya untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga APS Kalimantan Utara meningkat setiap tahunnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah sekolah harus diiringi dengan pemerataan lokasi dan dukungan kebijakan lain seperti penguatan fasilitas pendidikan dan subsidi pendidikan untuk meningkatkan APS secara signifikan.

- d. Secara keseluruhan variabel tingkat kemiskinan, PDRB per kapita dan Jumlah sekolah secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi Angka Partisipasi (APS) sekolah pada provinsi di Pulau Kalimantan maka, hipotesis keempat (H_4) diterima. Tingkat kemiskinan yang rendah dan PDRB per kapita yang tinggi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, didukung ketersediaan jumlah sekolah berkontribusi pada akses pendidikan. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan infrastruktur pendidikan untuk mendorong APS secara menyeluruh.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian, sebagai berikut:

V.2.1 Saran Teoritis

- a. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan variabel bebas yang lebih beragam pada penelitian berikutnya diluar variabel yang telah digunakan pada penelitian ini. Hal ini, agar mampu menganalisa faktor-faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap angka partisipasi sekolah.
- b. Pada peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas rentang waktu dan objek penelitian, agar hasil penelitian lebih baik dan lebih sesuai dengan yang diteliti dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada penelitian selanjutnya.

- c. Pada peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan serta memluas referensi dari sumber penelitian terdahulu dan terbaru serta referensi bacaan yang terpercaya.

V.2.2 Saran Praktis

- a. Pada pemerintah diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pada provinsi-provinsi dalam penelitian ini. Pemerintah dapat melakukan pemerataan ketersediaan pembangunan unit sekolah pada setiap wilayah agar dapat memudahkan akses pendidikan masyarakat, selain itu diperlukan peningkatan bantuan atau subsidi pendidikan yang tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan agar dapat meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat terhadap pendidikan. Langkah ini diharapkan tidak hanya berpengaruh pada provinsi di Pulau Kalimantan yang diteliti, namun seluruh provinsi di Indonesia.
- b. Para pihak berwenang yang mengambil kebijakan perlu memberikan perhatian khusus dan menimbang faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada angka partisipasi sekolah seperti diantaranya, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita dan jumlah sekolah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih memperhatikan pentingnya pendidikan dalam terciptanya kesejahteraan serta mampu berupaya untuk berpartisipasi pada pendidikan dan mengikuti kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan yaitu wajib belajar selama 12 tahun.